

POTRET BELANJA NEGARA DALAM APBN TAHUN 2023-2024 : ANALISIS PERBANDINGAN DAN TINJAUAN ISLAMI

Sakirah¹, A.Wulandari², Adryan Irawan³, Kamiruddin⁴, Arifin Sahaka⁵

Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3,4,5}

Email: ¹sakirahakia@gmail.com, ²andiwulandari80@gmail.com,

³adryanirawan31@gmail.com, ⁴kamiruddinamin@gmail.com, ⁵arifinsahaka1973@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memaparkan tentang potret belanja negara dalam APBN tahun 2023-2024 analisis perbandingan dan tinjauan Islami. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis belanja APBN tahun 2023-2024 dengan menggunakan sudut pandang Islam untuk melihat level keadilan yang diterapkan dalam alokasi belanja APBN utamanya yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada mendeskripsikan dan menganalisis potret APBN tahun 2023-2024 kemudian membandingkannya dengan pengelolaan belanja pemerintah di masa kejayaan Islam masa lampau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas anggaran belanja tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana lebih besar di belanja pemerintahan pusat yakni pada belanja barang. Tahun 2024 diketahui bahwa terjadi kenaikan anggaran belanja negara di tahun 2024. Hal ini terjadi karena anggaran belanja negara tahun 2024 bertujuan untuk percepatan transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional. Adapun potret APBN di masa pemerintahan Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan, tetapi berdasarkan pada pendapatan dan pengeluaran negara.

Kata Kunci : APBN, Belanja Negara, Islam

Abstract

This research presents a portrait of state spending in the 2023-2024 State Budget (APBN), with a comparative analysis and an Islamic perspective. The purpose of this study is to analyze the APBN spending for 2023-2024 from an Islamic point of view, to assess the level of fairness applied in the allocation of the budget, especially in areas directly impacting the society. This study employs a descriptive qualitative approach, focusing on describing and analyzing the 2023-2024 APBN, and then comparing it with the management of government spending during the Islamic Golden Age. The results show that the 2023 budget prioritizes higher spending for the central government, particularly in goods expenditure. In 2024, there is an increase in the state budget. This increase is aimed at accelerating economic transformation and implementing national priorities. In contrast, during the Islamic era, the state did not have an annual budget system, but instead based its spending on state revenues and expenditures.

Keywords : Government Budget, State Spending, Islam

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan vital untuk menentukan arah dari perekonomian dan utamanya kesejahteraan warga negara Indonesia sebagai negara yang sah dan berdaulat. Keberadaan dari APBN dianggap sebagai “nyawa” dari segala aktivitas perekonomian dan pembangunan negara, yang mana kedudukan APBN tidak hanya sekedar susunan angka yang dimuat dalam dokumen negara, tetapi dengan APBN merupakan gambaran prioritas pemerintah dalam merespon tantangan dan kebutuhan bangsa ini yang semakin kompleks. Oleh karenanya, adanya APBN sangat penting bagi keberlangsungan bangsa serta menjadi alat untuk melakukan peningkatan dan perbaikan di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara utamanya ekonomi dan kesejahteraan.

Memasuki era dengan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional yang berkenaan dengan kebijakan fiscal merupakan bagian dari peran APBN sebagai instrument untuk menjaga kestabilan makroekonomi.¹ Hal ini terlihat seperti saat pandemi Corona Virus (COVID-9) masuk di Indonesia, dalam situasi ini APBN menjadi andalan dalam menopang ekonomi dengan cara stimulus fiscal, belanja sosial, dan insentif pajak meskipun diketahui bahwa kebijakan fiscal yang responsive ini perlu adanya pertimbangan yang matang agar implikasinya dapat dirasakan serta tidak membebani generasi berikutnya.

APBN dibuat untuk menetapkan pedoman untuk pengeluaran dan penerimaan negara agar pengeluaran dan penerimaan tetap seimbang dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk mencapai peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan pada akhirnya, tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.² Salah satu bagian dari APBN yang menarik perhatian masyarakat terkait dengan alokasi belanja negara yang anggaran utamanya berasal dari pajak masyarakat Indonesia. Hal ini karena belanja negara berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat dan memiliki pengaruh global secara makroekonomi. Disamping itu, belanja negara berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Sehingga peran dari belanja negara ini sangat sentral bagi kelangsungan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

¹ M. Nur Arham, Kamiruddin et al., “Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam,” *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 7, no. 1 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>.

² Wawan Mulyawan and Widia Alia, “APBN Dan Pendapatan Nasional,” *Salam: Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 2, 2020, h.5.

Menurut Candra Fajri Ananda menunjukkan bahwa belanja negara dapat menjadi “parasut” bagi perekonomian Indonesia sehingga tidak sampai terjun bebas dan mengalami resesi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan efektifnya alokasi belanja negara untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha melalui kebijakan belanja countercyclical pemerintah dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).³ Selain itu dukungan UMKM disetiap daerah yang sadar dengan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal mampu memberdayakan ekonom secara berkelanjutan dan berkeadilan,⁴ termasuk strategi membangun ekonomi berdaya saing ditengah persaingan global.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa peran belanja APBN sangat krusial bagi masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dengan fokus pada kemaslahatan umat. Islam menempatkan peran negara sebagai pengelola amanah yang harus memastikan distribusi kekayaan secara adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, implementasi belanja negara pada dasarnya dapat mengkolaborasikan antara kebijakan masa kini dengan masa dimana Islam mengalami kejayaan secara ekonomi sehingga akan menjadi referensi dalam pengelolaan anggaran negara utamanya pada belanja APBN sehingga alokasinya dapat tepat sasaran dan efisien serta tidak terkesan membuang-buang anggaran.

Prinsip belanja pemerintah dalam Islam menurut an-Nabhani dan al-Maliki, dalam pengambilan kebijakan fiskal yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah setiap kebijakan haruslah memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder sesuai dengan kadar kemampuan individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat.⁶ Hal ini sejalan prinsip dasar dalam merancang anggaran APBN yaitu “dari rakyat untuk rakyat” yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, keadilan dan distribusi sumber daya, dan mendukung pembangunan

³ Candra Fajri Ananda, “Optimalisasi Belanja Pemerintah,” Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2021, <https://feb.ub.ac.id/optimalisasi-belanja-pemerintah>.

⁴ Aksi Hamzah, Otong Karyono, and S T Najmah, “The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications” 44, no. 3 (2024): 2266–75.

⁵ Kamiruddin Otong Karyono, “Strategy For Building Sharia-Conscious Competitiveness In Small And Medium Enterprises Based On Local Wisdom,” 2024.

⁶ Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, and Duta Bintang Fitriyah, “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam,” *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 2, no. 1 (2022): h.12, <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219>.

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁷ Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ana dan Gina Sonia menunjukkan bahwa belanja APBN tahun 2019-2022 belum mewakili maqasid asy-syari'ah saat ini atau masih berada pada tingkat yang moderat. Sehingga, dipandang perlu untuk menganalisis belanja APBN tahun 2023-2024 dengan menggunakan sudut pandang Islam untuk melihat level keadilan yang diterapkan dalam alokasi belanja APBN utamanya yang berdampak langsung bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada mendeskripsikan dan menganalisis potret APBN tahun 2023-2024 kemudian membandingkannya dengan pengelolaan belanja pemerintah di masa kejayaan Islam masa lampau. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelitian pustaka/ literature review yang diperoleh dari artikel, dokumen, media elektronik, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Belanja APBN 2024

APBN 2024 mengusung tema “Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dalam menuju Indonesia Maju dengan terus membangun pondasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktr, dan reformasi lainnya, serta mendukung penguatan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.⁸

Tabel 1.1
APBN 2024 (Belanja Negara)

APBN (triliun rupiah) Oktober 2024	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	Growth (% yoy)
Belanja Negara	3.325,12	2.556,72	76,89	14,10
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.467,53	1.834,49	74,35	16,68
1. Belanja K/L	1.090,83	933,45	85,57	21,44

⁷ Ulfa Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, “Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengna Perekonomian Di Era Modernisasi,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.

⁸ Kemenkeu, “APBN 2024 Siap Menghadapi Dinamika Perekonomian Global,” Kementerian Keuangan RI, 2024, dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2957-apbn-2024-siap-menghadapi-dinamika-perekonomian-global.html>, 11 Desember 2024

2. Belanja Non K/L	1.376,70	901,04	65,45	12,13
II. Transfer Ke Daerah	857,59	722,22	84,22	8,03

Sumber: APBN Kita, Kemenkeu

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Oktober 2024 mencapai Rp2.556,72 triliun, 76,89% target atau tumbuh 14,10% (yoy). Realisasi belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp1.834,49 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp722,22 triliun.⁹

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd Oktober	% thdp APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.090.83	933,45	85.57	21.44
Belanja Pegawai	285.80	242.25	84.76	13.41
Belanja Barang	405.26	351.17	86.65	24.27
Belanja Modal	247.47	218.00	88.09	40.02
Bantuan Sosial	152.30	122.03	80.13	4.47
Belanja Non-K/L	1.376.30	901.04	65.45	12.13
a.I Belanja Pegawai	198.63	159.73	80.41	16.63
Subsidi	285.97	211.87	74.09	19.59
Belanja Lain-Lain	388.04	121.86	31.40	(0.83)
TOTAL	2.467.53	1.834.49	74.35	16.68

Sumber: APBN Kita, Kemenkeu

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp933,45 triliun atau 85,57% dari pagu yang tumbuh 21,44% (yoy). Alokasi Belanja K/L direalisasikan untuk beberapa bidang seperti penyaluran berbagai program bantuan sosial, kegiatan Pemilu, dukungan infrastruktur, belanja pemeliharaan barang milik negara, pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam, serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 bagi pegawai yang aktif.¹⁰

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 16,68% (yoy) hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal yang tumbuh 40,02% (yoy) antara lain karena belanja infrastruktur mengalami peningkatan serta pengadaan alutsita. Kemudian, realisasi belanja

⁹ Kemenkeu, APBN KITA: Kinerja Dan Fakta, h. 13.

¹⁰ Kemenkeu, APBN KITA: Kinerja Dan Fakta, h.45.

barang tumbuh 24,48% (yoy) antara lain untuk pemantapan persediaan, menstabilkan pasokan dan harga pangan, serta penyelenggaraan Pemilu 2024. Lebih lanjut, realisasi belanja bansos lebih tinggi 4,47% (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya indeks dan sasaran Program Indonesia Pintar.

Realisasi Belanja Non-K/L per 31 Oktober 2024 mencapai Rp 901,04 triliun, 65,45% dari pagu atau tumbuh 12,13% (yoy). Realisasi Belanja Non-K/L ini utamanya dipengaruhi oleh penyaluran subsidi dan kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun. Secara garis besar mayoritas realisasi subsidi kredit program disalurkan kepada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, yaitu sebesar Rp33,75 triliun atau naik 9,08% (yoy).¹¹ Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp121,86 triliun, 31,40% dari pagu atau turun 0,83% (yoy). Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik yang mencapai Rp115,14 triliun. Selain itu, Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Program Kartu Prakerja dengan realisasi Rp4,17 triliun bagi 1,42 juta peserta.¹²

Tabel 1.3
Realisasi Transfer ke Daerah

Uraian	APBN	Realisasi	% thd APBN
Transfer Ke Daerah	857.591,74	722.222,4	84,22
Dana Bagi Hasil	143.099,93	107.765,7	75,31
Dana Alokasi Umum	427.699,30	377.210,0	88,20
Dana Alokasi Khusus	188.101,01	153.778,4	81,75
1. DAK Fisik	53.822,46	39.965,5	68,68
2. DAK Nonfisik	133.746,61	116.279,8	86,93
3. Hibah ke Daerah	513,94	533,0	103,71
Dana Otonomi Khusus	18,271,49	11.004,5	60,23
Dana Keistimewaan DIY	1.420,00	1.136,0	80,00
Dana Desa	71.000,00	66.467,5	93,62
Insentif Fiskal	8.000,00	4.860,4	60,76

Sumber: APBN Kita, Kemenkeu

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Oktober 2024 mencapai Rp722,22 triliun, 84,22% dari pagu atau tumbuh 8,03% (yoy). Secara umum, peningkatan realisasi TKD terutama ditopang oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp377,21 triliun, lebih tinggi Rp31,43 triliun atau tumbuh 9,09% (yoy) karena kenaikan porsi DAU *block grant*

¹¹ Kemenkeu, APBN KITA: Kinerja Dan Fakta, h. 13.

¹² Kemenkeu, APBN KITA: Kinerja Dan Fakta, h. 48.

dan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam memenuhi syarat salur Realisasi beberapa jenis TKD lainnya juga meningkat karena peningkatan kepatuhan Pemda dalam memenuhi syarat salur.

Secara lebih rinci, jenis TKD tersebut yaitu: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp107,77 triliun, lebih tinggi Rp6,14 triliun atau tumbuh 6,04% (yoy); 2) DAK Fisik terealisasi Rp36,97 triliun, lebih tinggi Rp1,11 triliun atau tumbuh 3,11% (yoy); 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi Rp116,28 triliun, lebih tinggi Rp8,79 triliun atau tumbuh 8,18% (yoy); 4) Dana Keistimewaan DIY terealisasi Rp1,14 triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun atau tumbuh 4,34% (yoy); dan 5) Dana Desa terealisasi Rp66,47 triliun, lebih tinggi Rp8,12 triliun atau tumbuh 13,92% (yoy). Sementara itu, capaian Dana Otonomi Khusus (Otsus), Insentif Fiskal, dan Hibah kepada Daerah menurun. Dana Otsus terealisasi Rp11,00 triliun, lebih rendah Rp0,71 triliun atau berkontraksi 6,06% (yoy). Insentif Fiskal terealisasi Rp4,86 triliun, lebih rendah Rp0,16 triliun atau berkontraksi 3,11% (yoy). Sedangkan Hibah kepada Daerah mencatatkan realisasi Rp0,53 triliun.¹³

Secara garis besar, prioritas anggaran belanja pemerintah pusat APBN diarahkan untuk pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi, kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan, penuntasan infrastruktur prioritas, pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pembayaran kewajiban pemerintah. Selanjutnya, belanja negara diprioritaskan padan anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, hukum, dan subsidi.¹⁴

2. Potret APBN 2023

APBN 2023 mengusung tema “Optimis dan Tetap Waspada” APBN 2023 dirancang optimis menjaga momentum pemulihan ekonomi, namun tetap waspada mengantisipasi ketidakpastian global agar rakyat tetap terlindungi. Berikut potret APBN dan realisasinya pada tahun 2023.

Tabel 2.1
APBN 2023 (Belanja Negara)

¹³ Kemenkeu, *APBN KITA: Kinerja Dan Fakta*, h. 14.

¹⁴ Trio Kurnia Dianto and Amelia Kurnia Fajri, “APBN 2024: Optimalisasi Belanja Negara Untuk Mendorong Transformasi Ekonomi Di Tengah Tantangan Global,” Kementerian Keuangan RI, 2023, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024:-optimalisasi-belanja-negara-untuk-mendorong-transformasi-ekonomi-di-tengah-tantangan-global>, 11 Desember 2024.

APBN (triliun rupiah) Oktober 2023	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	Growth (% yoy)
Belanja Negara	3.061,18	2.240,77	73,20	(4,68)
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.246,46	1.572,23	69,99	(5,94)
1. Belanja K/L	1.000,84	768,67	76,80	1,93
2. Belanja Non K/L	1.245,61	803,55	64,51	(12,40)
II. Transfer Ke Daerah	814,72	668,55	82,06	(1,57)

Sumber: APBN Kita, Kemenkeu

Realisasi Belanja Negara mencapai 73,20 persen terhadap pagu, terdiri atas: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,23 triliun, 69,99 persen dari pagu atau terkontraksi 5,94 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp768,67 triliun, 76,80 persen dari pagu atau naik 1,93 persen (yoy) dan realisasi Belanja non-K/L Rp803,55 triliun, 64,51 persen dari pagu atau turun 12,40 persen (yoy). Realisasi Transfer ke Daerah Rp668,55 triliun, 82,06 persen dari pagu atau turun 1,57 persen (yoy).¹⁵

Tabel 2.2
Belanja Pemerintah Pusat (2023)

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd Oktober	% thdp APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.000,84	768,67	76,80	1,93
Belanja Pegawai	272,89	213,60	78,27	1,49
Belanja Barang	374,12	282,57	75,53	(4,38)
Belanja Modal	210,32	155,69	74,03	25,29
Bantuan Sosial	143,52	116,81	81,39	(5,69)
Belanja Non-K/L	1.245,61	803,55	64,51	(12,40)
a.I Belanja Pegawai	169,62	136,96	80,74	4,91
Belanja Lain-Lain	329,32	122,88	37,31	(56,55)
TOTAL	2.246,46	1.572,22	69,99	(5,94)

Realisasi BPP sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp1.572,22 triliun, 69,98 persen dari pagu atau terkontraksi 5,93 persen (yoy). Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan program di bidang perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, realisasi BPP juga digunakan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah seperti subsidi dan kompensasi, serta gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran manfaat pensiun.

¹⁵Kemenkeu, "APBN KITA: Kinerja Dan Fakta," 2023, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6b9be3d0-39e7-43e2-8efd-1252c3179398/APBN-KiTaNovember-2023.pdf?ext=.pdf>.

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp768,67 triliun atau 76,80 persen dari Pagu. Realisasi Belanja K/L terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai kegiatan K/L seperti dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur prioritas, serta penyaluran berbagai bansos seperti PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, BOS, dan KIP Kuliah.¹⁶

Belanja Pegawai terealisasi Rp213,60 triliun atau 78,27 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pusat/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke13. Realisasi tersebut naik 1,49 persen (yoy).

Belanja Barang terealisasi Rp282,57 triliun atau 75,53 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Barang tersebut berkontraksi 4,38 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh pengelolaan dana kelapa sawit untuk program bio diesel dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada 2022 yang relatif lebih besar.

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp155,69 triliun atau 74,03 persen dari Pagu. Realisasi tersebut tumbuh 25,29 persen (yoy), antara lain dipengaruhi oleh belanja infrastruktur pada Kemen PUPR, modernisasi alutsista TNI oleh Kemenhan, pengadaan alat material khusus (almatsus) POLRI, serta pengadaan peralatan intelijen Kejaksaan dan BIN. Kinerja realisasi Belanja Modal digunakan antara lain untuk : (1) belanja modal peralatan dan mesin dengan pemanfaatan antara lain untuk pengadaan almatsus pada POLRI. (2) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi. (3) Belanja Modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan Kawasan IKN oleh Kemen PUPR, terminal bandara pada Kemenhub, gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kemendikbudristek, rumah sakit pada Kemenkes, dan rusun prajurit TNI & POLRI.¹⁷

Realisasi Bantuan Sosial mencapai Rp116,81 triliun, 81,39 persen dari pagu atau berkontraksi 5,69 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh pelaksanaan penebalan bantuan sosial berupa penyaluran BLT BBM yang mulai disalurkan pada Oktober 2022 namun tidak berlanjut ke 2023. Belanja Bantuan Sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran PKH bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program kartu sembako untuk 18,5 juta KPM

¹⁶ Kemenkeu, *APBN KITA: Kinerja dan Fakta*, h. 71.

¹⁷ Kemenkeu, *APBN KITA: Kinerja dan Fakta*, h. 72.

pada Kemensos; (2) pembayaran bantuan iuran kepada 96,4 juta peserta PBI JKN melalui Kemenkes; (3) penyaluran bantuan PIP bagi 14,3 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 789,7 ribu mahasiswa pada Kemendikbudristek dan Kemenag; serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

Realisasi Belanja non-K/L mencapai Rp803,55 triliun atau menurun 12,40 persen (yoy). Pemanfaatannya antara lain digunakan untuk penyaluran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi, serta kompensasi energi. Realisasi Belanja non-K/L tersebut terutama digunakan untuk subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

Belanja Pegawai Non-K/L terealisasi Rp136,96 triliun atau 80,74 persen dari Pagu. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp122,88 triliun atau 37,31 persen dari pagu. Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik Rp116,66 triliun. Selain itu, realisasi Belanja Lain-Lain juga bermanfaat untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja Rp4,37 triliun, termasuk biaya pelatihan dan insentif bagi 1,15 juta peserta.

Tabel 2.3
Transfer ke Daerah

Uraian	APBN	Realisasi	% thd APBN
Transfer Ke Daerah	814,72	668,55	82,06
Dana Bagi Hasil	136,26	101,63	74,58
Dana Alokasi Umum	396,00	345,78	87,32
Dana Alokasi Khusus	185,80	144,97	78,03
1. DAK Fisik	53,42	35,85	67,11
2. DAK Nonfisik	130,30	107,49	82,49
3. Hibah ke Daerah	2,08	1,63	78,57
Dana Otonomi Khusus	17,24	11,71	67,94
Dana Keistimewaan DIY	1,42	1,09	76,67
Dana Desa	70,00	58,34	83,35
Insentif Fiskal	8,00	5,02	62,71

Penyaluran TKD sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp668,55 triliun atau 82,06 persen dari pagu, turun 1,57 persen (yoy). Hingga periode ini, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 101,63 triliun atau 74,58 persen dari Pagu, turun 11,43 persen (yoy).

Penurunan tersebut disebabkan karena DBH PPh Perorangan lebih rendah Rp13,57 triliun atau 44,51 persen (yoy). Selain itu, penurunan realisasi DBH tersebut disebabkan oleh belum terdapat penyaluran Kurang Bayar (KB) DBH pada TA 2023. Sementara itu, pada periode yang sama TA 2022 terdapat penyaluran KB DBH Rp22,9 triliun.¹⁸

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp345,78 triliun. 87,32 persen dari pagu atau naik 1,38 persen (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan karena pada Oktober dilakukan penyaluran tahap III untuk DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum.

Dana Transfer Khusus, Penyaluran DAK Fisik hingga periode ini mencapai Rp35,85 triliun, 67,11 persen dari pagu atau terkontraksi 8,52 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pagu DAK Fisik berkurang yang berpengaruh pada nilai penyalurannya. Jika dilihat dari persentase, penyaluran DAK Fisik sampai dengan periode ini lebih baik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan persentase penyaluran tersebut dipengaruhi oleh perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan pada bidang Kesehatan & KB, bidang Jalan, dan bidang Perdagangan. Sementara itu, DAK Nonfisik terealisasi Rp107,49 triliun, 82,49 persen dari pagu atau tumbuh 2,34 persen (yoy). Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemda sehingga terdapat peningkatan pada kinerja penyaluran terutama pada Dana BOP PAUD dan Dana Bantuan BLPS dibandingkan tahun sebelumnya.

Sampai dengan periode ini, Dana Otsus disalurkan Rp11,71 triliun, 67,94 persen dari pagu atau terkontraksi 24,86 persen (yoy). Penurunan tersebut dikarenakan beberapa pemda belum menyampaikan dokumen syarat penyaluran secara lengkap dan benar dan terdapat sanksi penundaan penyaluran Dana Otsus selama satu bulan setelah dokumen syarat penyaluran lengkap dan benar diterima.

Sementara itu, Dais DIY terealisasi Rp1,09 triliun, 76,67 persen dari pagu atau tumbuh 3,10 persen (yoy), yang dikarenakan oleh kenaikan pagu alokasi Dais DIY tahun anggaran (TA) 2023. Alokasi Dais DIY TA 2023 tercatat Rp1,42 triliun, naik 7,5 persen dibanding TA 2022.¹⁹

Dana desa, sampai dengan periode ini, Dana Desa disalurkan Rp58,34 triliun, 83,35 persen dari pagu atau tumbuh 0,62 persen (yoy), dikarenakan tambahan Dana Desa sudah mulai

¹⁸ Kemenkeu, *APBN KITA: Kinerja dan Fakta*, h. 79.

¹⁹ Kemenkeu, *APBN KITA: Kinerja dan Fakta*, h. 80.

disalurkan pada Oktober 2023. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sampai periode ini telah disalurkan ke rekening kas desa Rp8,52 triliun kepada 2,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 74.918 desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa 2023 ditentukan untuk program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa.

Insentif fiskal, Realisasi penyaluran IF sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp5,02 triliun, 62,71 persen dari pagu, atau naik 10,06 persen (yoy). Peningkatan capaian tersebut salah satunya disebabkan oleh percepatan penyaluran IF atas kinerja dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tahap I Rp1,50 triliun atau 50 persen pagu alokasi disalurkan langsung kepada seluruh daerah penerima tanpa persyaratan dokumen. Meski demikian, daerah penerima alokasi tersebut tetap wajib menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi tahap I (dengan serapan minimal 20 persen dari dana yang sudah diterima) paling lambat 30 November 2023, jika ingin mendapatkan penyaluran tahap II sebesar 50 persen pagu alokasi sisanya.²⁰

3. Analisis Belanja APBN 2023-2024

Untuk lebih mudah memahami potret anggaran belanja negara pada tahun 2023 dan 2024, berikut akan dijabarkan secara rinci pada table di bawah ini:

APBN (triliun rupiah)	2023		2024	
	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober
Belanja Negara	3.061,18	2.240,77	3.325,12	2.556,72
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.246,46	1.572,23	2.467,53	1.834,49
1. Belanja K/L	1.000,84	768,67	1.090,83	933,45
2. Belanja Non K/L	1.245,61	803,55	1.376,70	901,04
II. Transfer Ke Daerah	814,72	668,55	857,59	722,22

²⁰ Kemenkeu, *APBN KITA: Kinerja dan Fakta*, h. 82.

Perbandingan alokasi anggaran belanja antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan beberapa pergeseran signifikan dalam prioritas pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2023 pemerintah mengalokasikan dana lebih besar di belanja pemerintahan pusat yakni pada belanja barang, yang terealisasi Rp282,57 triliun atau 75,53 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Barang tersebut berkontraksi 4,38 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh pengelolaan dana kelapa sawit untuk program bio diesel dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada 2022 yang relatif lebih besar. Selain itu prioritas anggaran belanja tahun 2023 juga pada infrastruktur yang terfokus pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai saat ini masih dalam proses tahap Pembangunan yang membutuhkan dana sangat besar sehingga sampai pada tahun 2024 pemerintah tetap konsisten menaikkan anggaran untuk sektor infrastruktur dibanding sebelumnya tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jika dilakukan analisa antara anggaran belanja negara di tahun 2023 dan 2024 diketahui bahwa terjadi kenaikan anggaran belanja negara di tahun 2024. Hal ini terjadi karena anggaran belanja negara tahun 2024 bertujuan untuk percepatan transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional. Selain itu, penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun menyumbang beberapa persen anggaran dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya untuk persiapan pemilu. Misalnya dalam operasional seperti KPU, Bawaslu, dan pengamanan dalam semarak pemilu ini. Kemudian di tahun 2024 prioritas anggaran juga diarahkan untuk menyelesaikan beberapa proyek yang harus selesai menjelang akhir pemerintahan sehingga anggaran yang dikeluarkan secara bersama-sama dalam beberapa proyek. Belum lagi tingkat inflasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga pemerintah perlu melakukan stimulus ekonomi melalui belanja negara. Transfer ke daerah juga mengalami peningkatan disebabkan adanya pilkada untuk pemilihan kepala daerah serta dukungan untuk pembangunan di tingkat lokal menjelang akhir jabatan kepala pemerintahan baik itu provinsi hingga desa.

4. APBN dalam Sudut Pandang Islam

Menilik ke dalam catatan sejarah Islam, tidak dikenal istilah kata APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam Islam, akan tetapi dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang

dikenal dengan Baitul Mal yang kurang lebih mempunyai tugas yang sama dengan APBN dalam sistem sekuler.

Dalam Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah, yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Di masa Nabi kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan juga dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah anggaran Baitul Mal jarang mengalami defisit anggaran, hal ini dikarenakan proporsi pengeluaran anggaran yang mampu menciptakan keseimbangan dana selalu terjaga. Defisit anggaran negara hanya pernah terjadi satu kali, yaitu saat hendak terjadi perang hunain. Karena ketiadaan anggaran, maka Rasulullah melakukan peminjaman kepada para sahabat. Saat perang telah selesai dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah, maka Rasulullah langsung membayarkan hutang negara kepada para sahabat tersebut. Oleh karena itu ekonomi Islam diarahkan untuk menghindari defisit anggaran yang berujung pada hutang negara.²¹

Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasal, maupun istilah-istilah dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara' mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.²²

²¹ Bachtiyar Asrofi Muchlis and Amin Wahyudi, 'Kebijakan Fiskal Dan Anggaran Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), 779–99.

²²Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). h. 269.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah ada, dan secara rincinya, bahwa pembelanjaan negara harus didasarkan kepada:²³

- a. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan demikian jauh dari sifat mubazir dan kikir disamping alokasinya harus sesuai syariah
- b. Prinsip keadilan, tidak hanya berpihak pada orang kaya dalam pembelanjaan
- c. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau dhoruroh, hajiyyah, dan kamaliyah

Belanja Negara dalam Bingkai Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Islam

Para pemikir awal Islam awal seperti Al-Mawardi, Abu Yusuf, Yahya ibn Adam, Abu Ubaid menyebutkan bahwa konsep dasar bagi alokasi pendapatan Negara adalah mashlahah. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh. Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan katagori ini adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.²⁴

Keamanan berfungsi melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar. Dalam menjamin keamanan di dalam negeri, dapat dilakukan dengan cara menegakkan hukum syariat yang berkaitan dengan sanksi terhadap orang yang melanggar selain itu adalah penegakan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pendidikan merupakan pilar yang melahirkan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan Negara menjamin pendidikan dari tenaga pengajar (guru), tempat pendidikan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya. Jaminan akan pendidikan ini juga termasuk jaminan hidup yang layak bagi para guru. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, seorang guru diberi gaji 15 dinar setiap bulannya. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, 15 dinar berarti setara dengan 63,75 gram emas. Jika harga emas sekarang Rp 100.000 per gram, maka gaji seorang guru di jaman Khalifah Umar dengan nilai uang sekarang adalah Rp 6,375

²³ Arham, Kamiruddin et al., "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam."

²⁴ Al-Maliki Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001). h. 45.

juta per bulannya. Padahal di jaman kejayaan Islam dulu, sumber-sumber ekonomi terutama dari sumber daya alam, juga produksi barang dan jasa serta perkembangan sains dan teknologi belum semaju dan sebanyak seperti sekarang ini. Akan tetapi jaminan pendidikan gratis dengan berbagai fasilitasnya, serta taraf hidup para guru jauh lebih baik pada masa Islam dibandingkan masa hegemoni ekonomi Kapitalis sekarang.

Kesehatan merupakan unsur yang sangat mempengaruhi kinerja seseorang bagi ekonomi dirinya dan keluarganya, bagi perusahaan tempat dia bekerja, bagi perekonomian masyarakat dan Negara. Dari aspek kesehatan, negara berkewajiban menyediakan dokter, obat-obatan, rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, serta berbagai sarana kesehatan, termasuk riset di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada seluruh masyarakat sehingga negaralah (Baitul Mal) yang menanggung seluruh biaya kesehatan ini bukan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan alokasi anggaran belanja antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan beberapa pergeseran signifikan dalam prioritas pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2023 pemerintah mengalokasikan dana lebih besar di belanja pemerintahan pusat yakni pada belanja barang, yang berkontraksi dipengaruhi oleh pengelolaan dana kelapa sawit untuk program bio diesel dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada 2022 yang relatif lebih besar.

Tahun 2024 diketahui bahwa terjadi kenaikan anggaran belanja negara di tahun 2024. Hal ini terjadi karena anggaran belanja negara tahun 2024 bertujuan untuk percepatan transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional. Selain itu, penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun menyumbang beberapa persen anggaran.

Adapun potret APBN di masa pemerintahan Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam negara demokrasi sekarang ini, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, maupun istilah-istilah dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara' tetapi mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.

Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan, agar dapat menghadapi perubahan kondisi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Ananda, Candra Fajri. "Optimalisasi Belanja Pemerintah." Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2021.
- Arham, Kamiruddin, M. Nur, Andi Tenri Gading Nurul Azizah, Andi Anugrah Rudianti, Kamiruddin Din, and Hukmiah Husain. "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>.
- Dianto, Trio Kurnia, and Amelia Kurnia Fajri. "APBN 2024: Optimalisasi Belanja Negara Untuk Mendorong Transformasi Ekonomi Di Tengah Tantangan Global." Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, and Duta Bintang Fitriyah. "Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 2, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219>.
- Hamzah, Aksi, Otong Karyono, and S T Najmah. "The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications" 44, no. 3 (2024): 2266–75.
- Kemenkeu. "APBN 2024 Siap Menghadapi Dinamika Perekonomian Global." Kementerian Keuangan RI, 2024.
- . "APBN KITA: Kinerja Dan Fakta," 2023.
- . *APBN KITA: Kinerja Dan Fakta*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024.

Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, Ulfa. “Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.

Muchlis, Bachtiyar Asrofi, and Amin Wahyudi. “KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN DALAM EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 779–99.

Mulyawan, Wawan, and Widia Alia. “APBN Dan Pendapatan Nasional.” *Salam: Islamic Economics Journal* 1, no. 2 (2020): 59.

Otong Karyono, Kamiruddin. “STRATEGY FOR BUILDING SHARIA-CONSCIOUS COMPETITIVENESS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BASED ON LOCAL WISDOM,” 2024.